



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak

Afiliasi:

¹Program Studi Akuntansi,
Universitas Diponegoro,
Semarang, Indonesia

***Correspondence:**

Amalia.nia27@gmail.com

DOI: 10.22219/jrak.v9i3.67

Sitasi:

Amalia, N. & Handayani. (2019).
Budaya Nasional Dan Risiko
Fraud. *Jurnal Reviu Akuntansi dan
Keuangan*,
9(3), 360-374.

Proses Artikel

Diajukan:

27 Agustus 2019

Direviu:

03 Oktober 2019

Direvisi:

27 November 2019

Diterima:

30 November 2019

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah
Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2615-2223

E-ISSN: 2088-0685

Tipe Artikel: Paper Penelitian

Budaya Nasional Dan Risiko Fraud

Nia Amalia^{1*} dan Rr. Sri Handayani¹

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence about the influence of national culture on fraud risk. The lack of literature that discusses fraud risk makes researchers interested in researching the relevance of national culture to understanding the risk of fraud so that it can help reduce fraud. Six dimensions of Hofstede's national culture were used in this study. As well, the Corruption Perception Index is proxied to measure fraud risk. The population in this study are countries in the world registered with the Corruption Perceptions Index 2018 by the Transparency International organization. The sample selection used a purposive sampling method and selected 81 sample countries. Multiple linear regression analysis was used as an analytical tool in this study. The results of the analysis of this study reveal that the dimension of power distance has a positive and significant effect on the risk of fraud. The dimensions of individualism, long-term orientation and indulgence negatively and significantly affect the risk of fraud. On the other hand the dimensions of uncertainty avoidance and masculinity have a positive but not significant effect on risk to the risk of fraud.

KEYWORDS: *Fraud Risk, Individualism, Indulgence, Long-term Orientation, Masculinity, Power Distance, Uncertainty Avoidance*

PENDAHULUAN
361

Potensi sebuah organisasi di setiap negara terkena paparan risiko *fraud* sangat tinggi. Risiko sering merujuk pada peristiwa potensial dan ketidakpastian (the International Organization for Standardization 2009). Hasil survey yang dilakukan *Association of Certified Fraud Examiners* pada tahun 2014, 2016 dan 2018 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus kecurangan di dunia. Pada tahun 2014 terjadi kasus penipuan sebanyak 1.483 kasus yang terjadi di lebih dari 100 negara yang disurvei. Kemudian pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu terdapat 2.410 kasus penipuan yang terjadi di 114 negara yang berbeda. Lebih lanjut, pada tahun 2018 terjadi 2.690 kasus penipuan yang terjadi di 125 negara dari 23 kategori industri yang berbeda. (*Association of Certified Fraud Examiners* 2014, 2016, 2018)

Kasus *fraud* yang terjadi menimbulkan kerugian biaya besar dan sulit dirincikan. Sebagian besar kasus *fraud* membawa biaya tidak langsung yang besar termasuk kehilangan produktivitas, reputasi, kerugian bisnis, biaya yang terkait dengan penyelidikan dan penyelesaian masalah. Total kerugian yang disebabkan kasus *fraud* bisa digambarkan seperti gunung es, beberapa kerugian terlihat jelas, namun ada sebagian besar kerugian yang tidak terlihat. (*Association of Certified Fraud Examiners* 2014)

Association of Certified Fraud Examiners mengestimasi bahwa dilakukan setiap tahun organisasi di setiap negara mengalami kerugian sebesar 5% dari pendapatannya karena *fraud*. Jika diperkirakan kerugian mencapai 5% maka berdasarkan World Gross Product 2017 yang sebesar US\$ 79,6 Triliun maka dapat diperkirakan kerugian ekonomi global mencapai US\$ 4 Triliun karena tindakan *fraud*. (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2018). Menurut survei ACFE Indonesia Chapter pada 2016 kecurangan yang sering terjadi di Indonesia adalah korupsi. Kerugian akibat tindakan korupsi ini sebesar Rp. 100.000.000 hingga Rp. 500.000.000 per kasus. Pelaku memiliki latar belakang pendidikan sarjana atau magister. Kecurangan sering dilakukan pada karyawan dengan masa kerja lebih dari 10 tahun karena karyawan tersebut telah mengenal dengan baik kondisi perusahaan dengan baik sehingga lebih leluasa dalam melakukan kecurangan. Tindakan pidana biasanya dapat terdeteksi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Media memiliki peranan penting dalam mendeteksi kecurangan berdasarkan laporan dari karyawan dari pihak internal perusahaan tersebut. Mayoritas pelaku kecurangan ini belum pernah dihukum. (ACFE Indonesia Chapter 2016)

Association of Certified Fraud Examiners (2018) menyatakan bahwa *fraud* secara umum merupakan ancaman luar biasa bagi organisasi dari semua jenis dan ukuran, di semua bagian dunia. Tindakan *fraud* merugikan banyak level organisasi mulai dari perusahaan privat, perusahaan publik, instansi pemerintahan dan administrasi publik, perusahaan nirlaba dan lainnya. Banyaknya kerugian berupa materil dan non-materil serta korban yang timbul karena *fraud* menyebabkan *fraud* bisa dikelompokkan sebagai *extra-ordinary crime* di dunia, sehingga setiap negara harus waspada terhadap paparan risiko *fraud*. (Fitria dan Amilin, 2014)

Memerangi *fraud* terdiri dari tindakan mencegah, mendeteksi dan investigasi. Model kontemporer untuk memahami *fraud* berakar pada pendekatan teori penipuan Cressey (1950). Penelitian Donald Cressey (1950) mengemukakan gagasan mengenai teori "*Fraud Triangle*" yang terdiri dari tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Teori ini digunakan untuk menganalisis paparan *fraud*, siapa pelaku potensial, elemen *fraud* serta apa strategi pencegahan, deteksi dan investigasi yang mungkin dapat dilakukan.

Alasan seorang melakukan tindakan kriminal seperti *fraud*, tidak bisa lepas dari aspek budaya (Mihret, 2014). Budaya itu sendiri merupakan suatu nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena sebuah budaya dibentuk oleh kelompok orang tertentu yang hidup bersama dalam suatu lingkungan sehingga menghasilkan sebuah fenomena kolektif. Manusia makhluk sosial yang hidup saling berdampingan, melakukan interaksi dan komunikasi antar sesama. Setiap sikap dan tindakan seorang sangat dipengaruhi budaya yang melingkupinya. Sehingga lingkungan dapat membentuk perilaku individu yang ada di dalamnya. Dimana fenomena kolektif ini dapat mempengaruhi seorang dalam mengambil sikap dan tindakan yang akan dilakukannya. *Fraud* terjadi di lingkungan organisasi, organisasi sendiri terdiri dari kelompok individu yang memiliki budaya yang mempengaruhi perilaku mereka. Menurut teori Asosiasi Differensial oleh Sutherland pada tahun 1947 (dalam Burgess dan Akers, 2013) menyatakan perilaku kriminal dapat dipelajari karena perilaku yang terjadi merupakan akibat dari suatu kondisi tertentu. Kondisi ini merupakan gambaran dari pengaruh sosial yang kuat (*reinforcement*). Sehingga, untuk mempelajari perilaku kriminal bisa dilihat melalui sebuah interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok pergaulan yang akrab. Dalam mempelajari perilaku kriminal ini tidak hanya melihat teknik untuk melakukan kejahatan namun motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang mendukung tindakan kriminal tersebut. Teori ini juga mendukung pernyataan bahwa tingkah laku kejahatan bukan sebuah warisan dari orangtua.

Pemahaman mengenai pengaruh budaya nasional dalam memahami risiko *fraud* memiliki sedikit perhatian dalam penelitian. Padahal mempelajari analisis seperti ini bisa berkontribusi dalam meningkatkan upaya pendekatan untuk mengurangi dampak dari *fraud*. Hofstede (2010) menjelaskan bahwa budaya merupakan suatu fenomena kolektif, karena setidaknya diberikan dan dipelajari oleh orang-orang yang tinggal atau hidup dalam lingkungan sosial yang sama. Sehingga, budaya merupakan suatu pemrograman kolektif dari pikiran yang membedakan anggota satu kelompok dengan kelompok yang lain. (Hofstede, Hofstede, dan Minkov, 2010)

Dorongan peneliti untuk melakukan penelitian ini berkaitan dengan ide bahwa budaya nasional dapat memberikan pertimbangan dalam mengembangkan teori *fraud*. Penelitian ini merupakan pengembangan dari riset Mihret (2014) yang berjudul "*National Culture and Fraud Risk : Exploratory Evidence*". Pada penelitian tersebut Mihret (2014) meneliti mengenai hubungan antara budaya nasional dengan risiko *fraud*. Pada riset Mihret (2014) belum menggunakan variabel budaya nasional secara keseluruhan. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih baik bagaimana budaya nasional dapat mempengaruhi tindakan kecurangan. Banyak peneliti telah melakukan observasi mengenai pengaruh budaya nasional terhadap beberapa variabel seperti manajemen laba, korupsi dan *fraud* laporan keuangan. Sehingga penelitian ini perlu dikembangkan untuk memberikan bukti apakah budaya nasional dapat mempengaruhi *fraud*. Studi yang dilakukan oleh Mihret (2014) menunjukkan bahwa jarak kekuasaan berhubungan positif dengan risiko *fraud*. Riset Kimbro (2002) dan Yeganeh (2014) menemukan hubungan positif antara jarak kekuasaan dengan korupsi. Arturo, Paredes, dan Wheatley, (2017) menemukan hubungan positif jarak kekuasaan dengan manajemen laba.

Hasil penelitian Arturo *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa penghindaran ketidakpastian berhubungan negatif dengan manajemen laba. Riset Yeganeh (2014) menunjukkan hasil penghindaran ketidakpastian berhubungan positif dengan korupsi. Penelitian Mihret (2014) menunjukkan hasil penghindaran ketidakpastian berhubungan positif dengan risiko *fraud*. Sementara itu, penelitian Yamen, Alqudah, Badawi, dan Bani-Mustafa (2017) menunjukkan bahwa penghindaran ketidakpastian berhubungan negatif dengan kejahatan

keuangan dan tidak ditemukan hubungan antara penghindaran ketidakpastian dengan manajemen laba (Desender, Castro dan Leon, 2011).

Hasil penelitian Yeganeh (2014) menunjukkan hasil individualisme berhubungan negatif dengan korupsi. Hasil riset Yamen *et al.*, (2017) juga menunjukkan bahwa individualisme berhubungan negatif dengan kejahatan keuangan. Penelitian Arturo *et al.*, (2017) menemukan adanya hubungan negatif antara individualisme dengan manajemen laba dan penelitian Zhang, Liang, dan Sun (2013) menyatakan bahwa manajemen laba lebih parah terjadi pada negara yang memiliki budaya kolektivis dibandingkan dengan budaya individualis.

Hasil riset Arturo *et al.*, (2017) menemukan adanya hubungan negatif antara manajemen laba dengan maskulinitas. Selanjutnya, ditemukan hubungan positif maskulinitas dengan korupsi (Yeganeh 2014) dan maskulinitas dengan kejahatan keuangan (Yamen et al. 2017). Namun, Mihret (2014) tidak menemukan pengaruh maskulinitas terhadap risiko *fraud*. Penelitian Mihret (2014) menunjukkan hasil bahwa orientasi jangka panjang berhubungan positif dengan risiko *fraud* serta kejahatan keuangan berhubungan positif dengan orientasi jangka panjang (Yamen et al. 2017). Selanjutnya, riset yang dilakukan oleh Yamen *et al.*, (2017) menemukan bahwa *indulgence* tidak berpengaruh terhadap kejahatan keuangan.

Berdasarkan *research gap* yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh dimensi budaya terhadap risiko *fraud*. Penelitian ini merupakan pengembangan dari riset Mihret (2014) yang berjudul “*National Culture and Fraud Risk : Exploratory Evidence*”. Pada riset tersebut meneliti mengenai hubungan antara budaya nasional dengan risiko *fraud*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mihret (2014) menguji 6 variabel yang terdiri dari 5 variabel independen (berupa jarak kekuasaan, Individualisme, ketidakpastian, orientasi jangka panjang, dan maskulinitas) dengan 1 variabel dependen yaitu risiko *fraud*. Serta, variabel dependen berupa risiko *fraud* yang diprosikan dengan *Corruption Perception Indexs* 2011 yang telah dilakukan *reserve coding*. Sedangkan pada penelitian ini menguji mengenai 6 variabel independen (berupa jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, individualisme, maskulinitas, orientasi jangka panjang, *indulgence*) dengan variabel dependen yaitu risiko *fraud* yang diprosikan dengan *Corruption Perception Index* 2018 yang telah dilakukan *reserve coding*. (Transparency International, 2019).

Perumusan Hipotesis

Jarak kekuasaan mengukur jarak distribusi kekuasaan antar anggota di dalam sebuah masyarakat tertentu. Jarak kekuasaan yang besar mengakibatkan ketimpangan yang besar. Masyarakat yang memiliki jarak kekuasaan yang besar cenderung memiliki sebuah tatanan hierarkis. Sehingga, hal ini menyebabkan anggota masyarakat yang memiliki posisi rendah cenderung tunduk pada anggota yang lebih memiliki otoritas lebih (Hofstede, Hofstede, and Minkov 2010). Adanya sikap tunduk ini, cenderung membuat anggota yang memiliki kedudukan rendah menjadi segan dan takut untuk menegur atasan mereka saat atasan tersebut melakukan tindakan *fraud* atau tindakan yang tidak wajar dalam organisasi atau perusahaan mereka. Hal ini menyebabkan peluang terjadi *fraud* menjadi semakin tinggi. Berdasarkan penelitian Mihret (2014) diperoleh bahwa negara-negara yang memiliki jarak kekuasaan yang besar memiliki eksposur risiko *fraud* yang lebih tinggi dari pada negara yang memiliki jarak kekuasaan kecil. Riset yang dilakukan Kimbro (2002) dan Yeganeh (2014) juga menemukan adanya hubungan khusus jarak kekuasaan yang tinggi dengan perilaku korupsi. Arturo *et al.*, (2017) juga menemukan hubungan positif jarak kekuasaan dengan manajemen laba.

H₁: Dimensi budaya Jarak Kekuasaan berpengaruh positif terhadap risiko *fraud*.

Penghindaran ketidakpastian adalah suatu tingkatan masyarakat yang merasa terancam oleh situasi yang tidak menentu atau yang tidak dipahami. Semakin tinggi nilai penghindaran ketidakpastian dalam suatu negara mengindikasikan bahwa masyarakat didalamnya lebih menyukai keadaan dengan kepastian dan memerlukan banyak kejelasan serta aturan yang terstruktur (Hofstede, Hofstede, and Minkov 2010). Mihret (2014) menyatakan bahwa penghindaran ketidakpastian yang tinggi dapat mempengaruhi risiko *fraud* karena cenderung meminimalkan dan memperkirakan potensi dari sebuah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh potensi efek *fraud* dan mengurangi risiko *fraud* dengan menempatkan mekanisme pencegahan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian Arturo *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa penghindaran ketidakpastian berhubungan negatif dengan manajemen laba serta Yamen *et al.*, (2017) menjelaskan bahwa kejahatan keuangan cenderung berkurang pada negara yang memiliki budaya penghindaran ketidakpastian yang tinggi.

H₂: Dimensi budaya Penghindaran Ketidakpastian berpengaruh negatif terhadap risiko fraud.

Individualisme berkaitan dengan masyarakat yang memiliki ikatan yang longgar antar individu. Masyarakat cenderung lebih memperhatikan diri sendiri dan hanya keluarga terdekat. Semakin rendah nilai individualisme disuatu negara menandakan bahwa masyarakat di negara tersebut kolektif. Kolektivisme sebagai kebalikan dari individualisme mewakili preferensi yang sangat erat dalam masyarakat di mana individunya dari sejak lahir dan seterusnya harus diintegrasikan dalam kelompok yang kuat, kohesif dan senantiasa melindungi kelompok mereka dengan mendapatkan imbalan loyalitas yang tidak perlu diragukan (Hofstede, Hofstede, and Minkov 2010). Loyalitas yang tidak diragukan ini dapat mendorong individu untuk melindungi kelompok mereka tanpa mepedulikan tindakan mereka apakah itu baik atau buruk (Yeganeh 2014). Pada kasus *fraud* yang sering terjadi, sangat sulit untuk mencegah tindakan *fraud* yang dilakukan secara bersama-sama daripada kejahatan *fraud* yang dilakukan oleh individu. Sehingga, kolektivisme ini dapat mempengaruhi risiko *fraud* karena cenderung menaikkan peluang terjadinya tindakan *fraud*. Hasil penelitian Zhang *et al.*, (2013) menemukan bahwa praktik manajemen laba yang lebih buruk dilakukan di negara-negara yang memiliki kolektivisme dibandingkan dengan negara-negara yang lebih individualis, meskipun manajemen laba tidak dikategorikan sebagai kejahatan tetapi merupakan tanda untuk tindakan yang tidak etis. Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan bahwa dimensi budaya kolektivisme berkaitan secara positif dengan perilaku korupsi serta meningkat pada negara yang memiliki profil Individualisme yang rendah. (Yeganeh, 2014 dan Yamen *et al.*, 2017).

H₃: Dimensi budaya Individualisme berpengaruh secara negatif terhadap risiko fraud.

Maskulinitas mewakili preferensi dalam masyarakat untuk pencapaian, kepahlawanan, ketegasan, dan imbalan materi untuk kesuksesan. Masyarakat secara luas menjadi lebih kompetitif. Semakin rendah nilai maskulinitas pada suatu negara mengindikasikan masyarakat negara tersebut lebih kearah feminim. Negara yang condong kearah budaya maskulin masyarakatnya cenderung mementingkan ketegasan, kepemilikan material, kinerja dan ambisi. Sebaliknya, dalam budaya feminin menekankan kebutuhan manusia, perawatan, dan saling ketergantungan. Tingginya persaingan hidup dalam dimensi maskulinitas membuat masyarakat rela melakukan apa saja untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya (Hofstede, Hofstede, and Minkov 2010). Namun, adanya persaingan dan perilaku ambisius dalam suatu masyarakat dapat mendorong seorang untuk melakukan hal perilaku yang tidak etis dan merugikan orang lain (Yeganeh 2014). Sehingga, semakin tinggi dimensi maskulinitas di dalam suatu negara dapat memicu terjadinya tindakan kejahatan

fraud. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Yeganeh (2014) yang mana ditemukan hubungan positif maskulinitas dengan korupsi dan maskulinitas dengan kejahatan keuangan (Yamen et al. 2017).

H₄: *Dimensi budaya Maskulinitas berpengaruh positif terhadap risiko penipuan.*

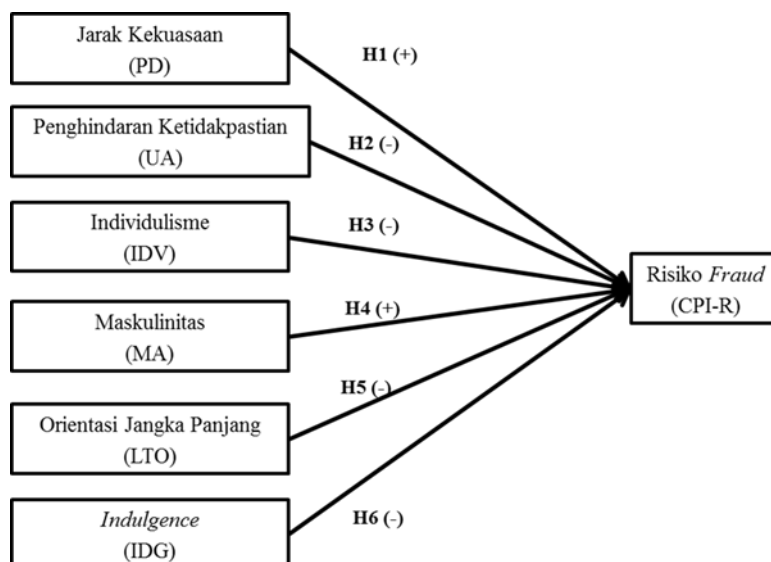
Orientasi jangka panjang mencerminkan masyarakat yang cenderung memperhatikan dan menumbuhkan nilai-nilai yang terkait dengan kebajikan dimasadepan seperti kegigihan dan penghematan. Negara yang cenderung memiliki dimensi budaya orientasi jangka panjang masyarakatnya sangat mempertimbangkan hasil keputusan yang terjadi saat ini karena mereka menganggap keputusan tersebut akan berdampak pada masa depan. Hofstede et al., (2010) menjelaskan bahwa masyarakat dengan orientasi jangka panjang cenderung menjunjung tinggi nilai penting dalam pekerjaan seperti kejujuran, akuntabilitas dan mampu beradaptasi dengan perubahan serta lebih memiliki tujuan jangka panjang. Sehingga, masyarakat yang memiliki orientasi jangka panjang lebih bisa melakukan perkiraan risiko *fraud* yang mungkin akan terjadi dimasa depan dan lebih siap menanggapi risiko *fraud* tersebut secara proaktif. Berdasarkan penelitian Mihret (2014) mengemukakan bahwa negara dengan orientasi jangka panjang terbatas memiliki paparan risiko *fraud* yang tinggi. Yamen et al., (2017) menyatakan kejahatan keuangan meningkat pada negara yang memiliki dimensi orientasi jangka panjang yang rendah.

H₅: *Dimensi budaya Orientasi Jangka Panjang berpengaruh negatif terhadap risiko fraud.*

Indulgence merefleksikan masyarakat dengan tatanan sosial yang sangat mentoleransi pengekspresian keinginan alami manusia terutama yang berkaitan berkaitan dengan menikmati hidup dan berbahagia. Negara yang memiliki budaya *indulgence* yang tinggi, masyarakatnya lebih fokus terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan sehingga dapat mengurangi pengekspression. Masyarakat yang termasuk dalam kondisi *indulgence* dinilai dapat lebih menikmati kehidupan dan memiliki sikap optimis dan lebih memiliki emosi positif (Hofstede, Hofstede, and Minkov 2010). Adanya sikap optimis dan cara berpikir yang positif dalam menjalani kehidupan dapat mengurangi tekanan dan dorongan untuk melakukan tindakan yang tidak etis dan merugikan orang lain. Cressey (1950) mengemukakan bahwa faktor penyebab *fraud* yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Sehingga, kondisi masyarakat *indulgence* yang mampu mengurangi atau meminimalisir munculnya salah satu faktor penyebab *fraud* dapat menurunkan peluang terjadinya tindakan *fraud*. Sehingga, semakin tinggi budaya *indulgence* dapat menurunkan risiko *fraud*.

H₅: *Dimensi budaya budaya Indulgence berpengaruh negatif terhadap risiko fraud.*

Berikut merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 1.
Kerangka
Pemikiran

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah risiko *fraud* dan budaya nasional hofstede. Besaran risiko *fraud* di peroleh dari proksi *Corruption Perceptions Index* 2018 yang telah dilakukan *reverse coding*. Penelitian ini menggunakan indeks persepsi korupsi karena dari tiga skema *fraud* yang terdiri korupsi, penyelewengan aset dan *fraud* laporan keuangan. Korupsi menjadi skema yang sering dilakukan dalam kasus-kasus *fraud*. Sehingga indeks korupsi dapat digunakan untuk memproksikan risiko *fraud*. Semakin tinggi skor proxy CPI-R menandakan bahwa paparan risiko fraud yang terjadi di negara tersebut kecil. Untuk budaya hofstede itu sendiri memiliki beberapa dimensi yaitu: jarak kekuasaan (PD), penghindaran ketidakpastian (UA), individualisme (IDV), maskulinitas (MA), orientasi jangka panjang (LTO) dan *indulgence* (IDG).

METODE

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah risiko *fraud*. Besaran risiko *fraud* di peroleh dari proxy *Corruption Perceptions Index* 2018 yang telah dilakukan *reverse coding* atau pengkodean terbalik terlebih dahulu. Berdasarkan pernyataan Mihret (2014) dan Yeganeh (2014) pengkodean terbalik atau *reverse coding* diperlukan untuk membuat interpretasi hasil analisis statistik menjadi lebih langsung. Berikut cara melakukan pengkodean terbalik :

$$\begin{aligned} \text{CPI} &= (100 - X) \\ &= \text{CPI-R} \end{aligned}$$

Dimana Nilai X adalah Indeks Persepsi Korupsi sesungguhnya dari negara dalam sampel penelitian.

Transparency International menentukan indeks untuk setiap negara mulai dari 100 ("sangat bersih") hingga 0 ("sangat korup"). Namun, dalam penelitian ini indeks persepsi korupsi yang digunakan telah dilakukan pengkodean terbalik terlebih dahulu sehingga merubah interpretasi data. Setelah dilakukan pengkodean terbalik indeks setiap negara yang memiliki indeks 0 dapat diinterpretasikan "sangat bersih" dari korupsi dan 100 "sangat korup" dari tindakan korupsi. Penggunaan proksi indeks persepsi korupsi karena *fraud* merupakan tindakan penyembunyian dan pengubahan hasil kecurangan. Minimnya publisitas yang dilakukan oleh korban serta korupsi dan *fraud* memiliki kesamaan.

Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah budaya nasional. Penelitian ini menggunakan model multidimensi yang digunakan oleh Geert Hofstede yang mengkategorikan budaya nasional menjadi enam dimensi; jarak kekuasaan (PD), individualisme *versus* kolektivisme (IDV), penghindaran ketidakpastian (UA), maskulinitas *versus* feminitas (MA), orientasi jangka panjang *versus* orientasi jangka pendek (LTO), dan *indulgence versus restraint* (IDG) (Hofstede 2011). Semua dimensi diberi skor dari 0 hingga 100. Banyak penelitian telah menguji reliabilitas dan validitas serta mereplikasi nilai-nilai budaya Geert Hofstede sebagai ukuran untuk dimensi budaya seperti Hoppe (1993); Shane dan Venkataraman (1996); Helmreich dan Merritt (1998) (dikutip dari Yamen *et al.*, 2017). Sesuai dengan literatur yang disebutkan di atas, dimensi budaya Geert Hofstede telah digunakan sebagai ukuran untuk budaya dalam penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh negara yang terdaftar dalam CPI atau *Corruption Perception Index* 2018. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari website www.transparency.org. (Transparency International 2019) Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah memiliki skor 6 (enam) dimensi budaya hofstede yang lengkap.

Sumber data untuk dimensi budaya hofstede diperoleh dari www.hofstede-insight.com. (Hofstede 2018).

Teknik Analisis Data

Tahapan analisis penelitian terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hubungan variabel Jarak Kekuasaan (PD), Penghindaran Ketidakpastian (UA), Individualisme (IDV), Maskulinitas (MA), Orientasi Jangka Panjang (LTO) dan *Indulgence* (IDG). Dengan variable dependen berupa Risiko *Fraud* (CPI-R). Sebelum

Persamaan regresi yang dipakai adalah sebagai berikut:

$$CPI-R = \beta_0 + \beta_1 PD - \beta_2 UA - \beta_3 IDV + \beta_4 MA - \beta_5 LTO - \beta_6 IDG + e$$

Keterangan :

CPI-R (Indeks korupsi yang telah di “*reserve coding*”), **PD** (Jarak Kekuasaan), **UA** (Penghindaran Ketidakpastian), **IDV** (Individualisme), **LTO** (Orientasi Jangka Panjang), **MA** (Maskulinitas) dan **IDG** (*Indulgence*)

$\beta_1 - \beta_6$ untuk koefisien regresi dari variabel independen

e untuk standar error.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh negara yang terdaftar dalam *Corruption Perception Index* 2018. Ada 180 negara yang ada dalam *Corruption Perception Index* 2018. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah memiliki skor 6 (enam) dimensi budaya hofstede yang lengkap. Sehingga, ada 79 sampel penelitian yang tidak memenuhi 6 skor dimensi budaya nasional dan 20 sampel penelitian tidak memiliki kelengkapan 6 skor dimensi budaya. Setelah dilakukan pengambilan sampel secara *purposive* tersisa 81 negara yang menjadi sampel penelitian.

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) dari masing-masing variabel, (Ghozali, 2011).

Untuk memudahkan melakukan interpretasi pada masing-masing variabel maka digunakan indikator pengukuran. Indikator pengukuran untuk variabel dependen dan independen memiliki lima tingkatan, yaitu : skor 0 sampai 20 mengindikasikan sangat rendah, skor 21 sampai 40 mengindikasikan rendah, skor 41 sampai 60 mengindikasikan sedang, skor 61 sampai 80 mengindikasikan tinggi dan skor 81 sampai 100 mengindikasikan sangat tinggi.

Jumlah negara yang terdaftar dalam <i>Corruption Perception Index</i> 2018	180
Jumlah negara yang tidak memiliki penilaian indeks dimensi budaya nasional Hofstede	(79)
Jumlah negara yang tidak memiliki penilaian indeks dimensi budaya nasional Hofstede secara penuh	(20)
TOTAL SAMPEL	81

Tabel 1.
Ringkasan
Sampel
Penelitian

Tabel 2.
Hasil Uji
Statistik
Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rerata	Deviasi Standar
CPI-R	81	12	83	51,80	20,402
PD	81	11	100	62,20	20,528
UA	81	8	100	65,20	21,241
IDV	81	12	91	41,95	22,768
MA	81	5	100	48,40	19,593
LTO	81	4	100	43,74	23,896
IDG	81	0	100	47,37	23,227

Keterangan: CPI-R (Risiko *Fraud*), PD (Jarak Kekuasaan), UA (penghindaran Ketidakpastian), IDV (Individualisme), MA (Maskuninitas), LTO (Orientasi Jangka Panjang), IDG (*Indulgence*)

Berdasarkan pada tabel uji statistik deskriptif pada tabel 2 menunjukkan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 81. Negara yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi 0 sampai 20 mengindikasikan bahwa negara tersebut memiliki risiko *fraud* yang sedang rendah. Negara yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi 21 sampai 40 mengindikasikan bahwa negara tersebut memiliki risiko *fraud* yang rendah. Negara yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi 41 sampai 60 mengindikasikan bahwa negara tersebut memiliki risiko *fraud* yang sedang. Negara yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi 61 sampai 80 mengindikasikan bahwa negara tersebut memiliki risiko *fraud* yang sedang tinggi serta negara yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi 81 sampai 100 mengindikasikan bahwa negara tersebut memiliki risiko *fraud* yang sangat tinggi.

Dari hasil analisis tersebut dapat dilihat variabel dependen yaitu risiko *fraud* (CPI-R) memiliki nilai minimum sebesar 12 yang artinya tingkat risiko kecenderungan *fraud* di negara tersebut sangat kecil. Nilai maksimum sebesar 83 artinya tingkat risiko *fraud* sangat tinggi. Nilai rata-rata sebesar 51,80 dapat diartikan bahwa tingkat risiko *fraud* di setiap negara sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat risiko *fraud* di 81 negara yang diobservasi cenderung moderat. Standar deviasi sebesar 20,40 mengindikasikan bahwa data memiliki tingkat penyebaran data yang tinggi, kondisi ini dapat dilihat dari standar deviasi data yang menjauhi angka nol. Selain itu data mempunyai rata-rata data yang bernilai lebih dari standar deviasi data, hal ini menunjukkan rata-rata data merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data.

Jarak Kekuasaan (PD) memiliki nilai minimal sebesar 11 yang artinya jarak kekuasaan *fraud* di negara tersebut sangat kecil. Nilai maksimal sebesar 100 yang artinya jarak kekuasaan dinegara tersebut sangat tinggi. Nilai rata-rata sebesar 62,20 dapat diartikan bahwa jarak kekuasaan yang ada di setiap negara tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya jarak kekuasaan di 81 negara yang diobservasi sama-sama tinggi. Standar deviasi sebesar 20,528 mengindikasikan bahwa data memiliki tingkat penyebaran data yang tinggi, kondisi ini dapat dilihat dari standar deviasi data yang menjauhi angka nol. Selain itu data mempunyai rata-rata data yang bernilai lebih dari standar deviasi data, hal ini menunjukkan rata-rata data merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data.

Penghindaran Ketidakpastian (UA) memiliki nilai minimal sebesar 8 artinya penghindaran ketidakpastian di negara tersebut sangat rendah. Nilai maksimal sebesar 100 artinya penghindaran ketidakpastian dinegara tersebut sangat tinggi. Nilai rata – rata 65,20 dapat diartikan bahwa penghindaran ketidakpastian di setiap negara tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kegelisahan atas ketidakpastian di 81 negara yang diobservasi tinggi. Standar deviasi sebesar 21,241 mengindikasikan bahwa data memiliki tingkat penyebaran data yang

tinggi, kondisi ini dapat dilihat dari standar deviasi data yang menjauhi angka nol. Selain itu data mempunyai rata-rata data yang bernilai lebih dari standar deviasi data, hal ini menunjukkan rata-rata data merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data.

Individualisme (IDV) memiliki nilai minimal sebesar 12 artinya negara tersebut memiliki tingkat kolektivitas yang tinggi. Nilai maksimal sebesar 91 artinya negara tersebut sangat individualis. Nilai rata – rata sebesar 41,95 dapat diartikan bahwa tingkat Individualismee disetiap negara sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat individualitas di 81 negara yang diobservasi cenderung moderat. Standar deviasi sebesar 22,768 mengindikasikan bahwa data memiliki tingkat penyebaran data yang tinggi, kondisi ini dapat dilihat dari standar deviasi data yang menjauhi angka nol. Selain itu data mempunyai rata-rata data yang bernilai lebih dari standar deviasi data, hal ini menunjukkan rata-rata data merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data.

Maskulinitas (MA) memiliki nilai minimal sebesar 5 yang artinya negara tersebut memiliki tingkat maskulinitas yang rendah. Nilai maksimal sebesar 100 artinya tingkat maskulinitas di negara tersebut sangat tinggi. Nilai rata – rata sebesar 48.40 dapat diartikan bahwa disetiap negara tingkat maskulinitas sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat maskulinitas di 81 negara yang diobservasi cenderung moderat. Standar deviasi sebesar 19.593 mengindikasikan bahwa data memiliki tingkat penyebaran data yang tinggi, kondisi ini dapat dilihat dari standar deviasi data yang menjauhi angka nol. Selain itu data mempunyai rata-rata data yang bernilai lebih dari standar deviasi data, hal ini menunjukkan rata-rata data merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data.

Orientasi Jangka Panjang (LTO) memiliki nilai minimal sebesar 4 yang artinya negara tersebut memiliki orientasi jangka panjang yang sangat terbatas. Nilai maksimal sebesar 100 yang artinya bahwa negara tersebut memiliki orientasi jangka panjang yang tinggi. Nilai rata – rata sebesar 43.74 dapat diartikan bahwa disetiap negara memiliki tingkat orientasi jangka panjang yang sedang. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi jangka panjang di 81 negara yang diobservasi cenderung moderat. Standar deviasi sebesar 23.896 mengindikasikan bahwa data memiliki tingkat penyebaran data yang tinggi, kondisi ini dapat dilihat dari standar deviasi data yang menjauhi angka nol. Selain itu data mempunyai rata-rata data yang bernilai lebih dari standar deviasi data, hal ini menunjukkan rata-rata data merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data.

Variabel	β	Sig.	T
(Costant)	42,677	,000	3,831
PD	,390	,000	3,831
UA	,086	,193	4,007
IDV	-,259	,003	-3,050
MA	,139	,055	1,953
LTO	-,303	,000	-4,629
IDG	-,146	,035	-2,143

Keterangan: CPI-R (Risiko Fraud), PD (Jarak Kekuasaan), UA (penghindaran Ketidakpastian), IDV (Individualisme), MA (Maskuninitas), LTO (Orientasi Jangka Panjang), IDG (Indulgence)

Tabel 3.
Hasil Uji Hipotesis

Indulgence (IDG) memiliki nilai minimal sebesar 0 artinya negara tersebut memiliki tingkat *indulgence* yang sangat rendah. Nilai maksimal sebesar 100 artinya negara tersebut memiliki skor *indulgence* yang sangat tinggi. Nilai rata – rata sebesar 47.37 dapat diartikan bahwa disetiap negara memiliki tingkat kebahagiaan yang relatif rendah. Nilai standar deviasi sebesar 23.227 mengindikasikan bahwa data memiliki tingkat penyebaran data yang tinggi, kondisi ini dapat dilihat dari standar deviasi data yang menjauhi angka nol. Selain itu data mempunyai rata-rata data yang bernilai lebih dari standar deviasi data, hal ini menunjukkan rata-rata data merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data.

Dalam penelitian ini menggunakan derajat kepercayaan sebesar 95% atau dengan nilai signifikansi sebesar 0,05 serta pengambilan dasar keputusan hipotesis diterima apabila nilai β memiliki arah yang sesuai dengan dan memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0.05. Tabel 3 menunjukkan hasil uji hipotesis penelitian menggunakan aplikasi SPSS versi 21.

Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 3 nilai β variabel jarak kekuasaan (PD) positif sebesar 0,390 dan nilai signifikansi 0.000 artinya kurang dari 0.05. Oleh karena itu, hipotesis pertama diterima. Hasil pengujian ini dapat mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa jarak kekuasaan berpengaruh positif terhadap risiko *fraud*.

Jarak kekuasaan yang besar mengakibatkan ketimpangan yang besar. Negara yang memiliki jarak kekuasaan yang besar, masyarakatnya cenderung memiliki sebuah tatanan hierarkis. Adanya tatanan hierarkis ini cenderung membuat anggota didalam masyarakat dituntut harus berperilaku sesuai dengan posisinya (Hofstede, Hofstede, and Minkov 2010). Dalam budaya jarak kekuasaan yang tinggi, posisi atasan memiliki tingkat kekuasaan yang lebih tinggi dan orang dengan kedudukan yang lebih tinggi harus selalu dipatuhi serta ditaati. Kondisi masyarakat yang memiliki jarak kekuasaan yang besar, menyebabkan anggota yang memiliki kedudukan rendah menjadi segan dan takut untuk menegur atasan mereka saat atasan tersebut melakukan tindakan *fraud* atau tindakan yang tidak wajar dalam organisasi atau perusahaan mereka. Sehingga, menyebabkan peluang terjadi *fraud* menjadi semakin tinggi. Hasil pengujian penelitian ini sejalan dengan Mihret (2014) yang menjelaskan bahwa negara-negara yang memiliki jarak kekuasaan yang besar memiliki eksposur risiko *fraud* yang lebih tinggi dari pada negara yang memiliki jarak kekuasaan kecil. Serta, riset yang telah dilakukan Kimbro (2002), Yeganeh (2014) dan Arturo et al., (2017) yang menemukan adanya hubungan khusus jarak kekuasaan yang tinggi dengan perilaku korupsi dan manajemen laba.

Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 3 nilai β variabel penghindaran ketidakpastian (UA) positif sebesar 0,086 dan nilai signifikansi 0.193 artinya lebih dari 0.05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Sehingga hasil pengujian tidak dapat mendukung hipotesis kedua yang menyatakan penghindaran ketidakpastian berpengaruh negatif terhadap risiko *fraud*.

Penghindaran ketidakpastian tinggi mencerminkan tingkatan masyarakat yang merasa terancam terhadap ambiguitas dan tindakan untuk mengurangi ketidakpastian tersebut dengan membuat banyak aturan yang terstruktur. Banyaknya aturan yang terbentuk justru tidak dapat meminimalisir risiko kecurangan. Hofstede (2010) menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki budaya penghindaran ketidakpastian yang tinggi menciptakan banyak aturan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan emosional. Masyarakat penghindaran ketidakpastian tinggi hanya peduli dengan adanya aturan namun tidak

mempedulikan pelaksanaan aturan tersebut. Sehingga, banyaknya aturan yang dibentuk belum mampu meminimalisir tindakan *fraud* secara optimal. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Desender et al., (2011) dimana penghindaran ketidakpastian tidak berpengaruh dengan manajemen laba.

Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 3 nilai β variabel individualisme (IDV) negatif sebesar $-0,259$ dan nilai signifikansi $0,003$ artinya kurang dari $0,05$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Hasil pengujian ini dapat mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa individualisme berpengaruh negatif terhadap risiko *fraud*.

Individualisme berkaitan dengan masyarakat yang memiliki ikatan yang longgar antar individu. Masyarakat cenderung lebih memperhatikan diri sendiri dan hanya keluarga terdekat. Semakin rendah nilai individualisme disuatu negara menandakan bahwa masyarakat di negara tersebut kolektif. Kolektivisme sebagai kebalikan dari individualisme mewakili preferensi yang sangat erat dalam masyarakat di mana individunya dari sejak lahir dan seterusnya harus diintegrasikan dalam kelompok yang kuat, kohesif dan senantiasa melindungi kelompok mereka dengan mendapatkan imbalan loyalitas yang tidak perlu diragukan (Hofstede, Hofstede, and Minkov 2010). Loyalitas yang tidak diragukan ini dapat mendorong individu untuk melindungi kelompok mereka tanpa mempedulikan tindakan mereka apakah itu baik atau buruk (Yeganeh 2014). Pada kasus *fraud* yang sering terjadi, sangat sulit untuk mencegah tindakan *fraud* yang dilakukan secara bersama-sama daripada kejahatan *fraud* yang dilakukan oleh individu. Sehingga, kolektivisme ini dapat mempengaruhi risiko *fraud* karena cenderung menaikkan peluang terjadinya tindakan *fraud*.

Hasil penelitian Zhang et al., (2013) menemukan bahwa praktik manajemen laba yang lebih buruk dilakukan di negara-negara yang memiliki kolektivisme dibandingkan dengan negara-negara yang lebih individualis, meskipun manajemen laba tidak dikategorikan sebagai kejahatan tetapi merupakan tanda untuk tindakan yang tidak etis. Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan bahwa dimensi budaya kolektivisme berkaitan secara positif dengan perilaku korupsi serta meningkat pada negara yang memiliki profil Individualismee yang rendah. (Yeganeh, 2014 dan Yamen et al., 2017)

Pengujian Hipotesis 4

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 3 nilai β variabel maskulinitas (MA) positif sebesar $0,139$ dan nilai signifikansi $0,055$ artinya lebih dari $0,05$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Hasil pengujian tidak dapat mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa maskulinitas berpengaruh positif terhadap risiko *fraud*.

Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan penelitian Yamen et al., (2017) dan Yeganeh (2014) bahwa kejahatan keuangan dan korupsi banyak terjadi pada negara yang memiliki profil maskulinitas tinggi. Diperkuat dengan hasil regresi data dimana jumlah signifikansi variabel independen maskulinitas sebesar $0,055$ yang mana lebih dari $0,05$ sehingga hipotesis ditolak. Namun, jika melihat nilai β sebesar $0,139$ hasil pengujian pada penelitian ini tetap memiliki arah yang sama. Hal ini dapat disebabkan karena durasi sample yang digunakan hanya 1 periode waktu sehingga data tidak mampu menjelaskan risiko *fraud* yang terjadi secara luas.

Jika dilihat nilai standar deviasi sebesar $19,593$ menunjukkan bahwa varian di dalam data observasi sangat rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat maskulinitas dalam 81 negara yang diobservasi tersebar namun memiliki nilai yang mirip sehingga skor

maskulinitas dominan sama. Skor maskulinitas yang dominan sama dapat artikan bahwa masing-masing negara yang diobservasi sama-sama memiliki ambisi besar agar dapat memiliki kesuksesan. Pada saat penelitian ini di buat kondisi ekonomi makro menurut World Bank (2017-2019) dalam masa stabil setelah krisis ekonomi tapi ketidakpastiannya masih tinggi sehingga data penelitian ini menjadi tidak *predictable*. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mihret (2014) dimana maskulinitas tidak berpengaruh terhadap eksposur risiko *fraud*.

Pengujian Hipotesis 5

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 3 nilai β variabel orientasi jangka panjang (LTO) negatif sebesar $-0,303$ dan nilai signifikansi $0,000$ artinya kurang dari $0,05$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima. Hasil pengujian ini dapat mendukung hipotesis kelima yang menyatakan bahwa orientasi jangka panjang berpengaruh negatif terhadap risiko *fraud*.

Orientasi jangka panjang mencerminkan masyarakat yang cenderung memperhatikan dan menumbuhkan nilai-nilai yang terkait dengan kebajikan dimasadepan seperti kegigihan dan penghematan. Negara yang cenderung memiliki dimensi budaya orientasi jangka panjang masyarakatnya sangat mempertimbangkan hasil keputusan yang terjadi saat ini karena mereka menganggap keputusan tersebut akan berdampak pada masa depan. Hofstede *et al.*, (2010) menjelaskan bahwa masyarakat dengan orientasi jangka panjang cenderung menjunjung tinggi nilai penting dalam pekerjaan seperti kejujuran, akuntabilitas dan mampu beradaptasi dengan perubahan serta lebih memiliki tujuan jangka panjang. Sehingga, masyarakat yang memiliki orientasi jangka panjang lebih bisa melakukan perkiraan risiko *fraud* yang mungkin akan terjadi dimasa depan dan lebih siap menanggapi risiko *fraud* tersebut secara proaktif. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil riset Mihret (2014) menyatakan bahwa negara dengan orientasi jangka panjang terbatas memiliki paparan risiko *fraud* yang tinggi serta sesuai dengan riset Yamen *et al.*, (2017) menyatakan kejahatan keuangan meningkat pada negara yang memiliki dimensi orientasi jangka.

Pengujian Hipotesis 6

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 3 nilai β variabel *indulgence* (IDG) negatif sebesar $-0,146$ dan nilai signifikansi $0,035$ artinya kurang dari $0,05$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam diterima. Hasil pengujian ini dapat mendukung hipotesis keenam yang menyatakan bahwa *indulgence* berpengaruh negatif terhadap risiko *fraud*.

Indulgence merefleksikan masyarakat dengan tatanan sosial yang sangat mentoleransi pengekspresian keinginan alami manusia terutama yang berkaitan berkaitan dengan menikmati hidup dan berbahagia. Negara yang memiliki budaya *indulgence* yang tinggi, masyarakatnya lebih fokus terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan sehingga dapat mengurangi pengekspression. Masyarakat yang termasuk dalam kondisi *indulgence* dinilai dapat lebih menikmati kehidupan dan memiliki sikap optimis (Hofstede, Hofstede, and Minkov 2010). Sikap optimis dalam menjalani kehidupan dapat mengurangi tekanan dan kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal seperti *fraud*. Sehingga, semakin tinggi budaya *indulgence* dapat menurunkan risiko *fraud*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Cressey (1950) yang menyatakan bahwa faktor penyebab *fraud* yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Sehingga, kondisi masyarakat *indulgence* yang mampu mengurangi atau meminimalisir munculnya salah satu faktor penyebab *fraud* dapat menurunkan peluang terjadinya tindakan *fraud*. Dengan demikian, adanya *indulgence* yang tinggi mampu menurunkan risiko *fraud*.

SIMPULAN

373

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh budaya nasional terhadap risiko *fraud*. Penelitian ini menggunakan 81 negara sampel data. Berdasarkan pengujian analisis regresi linear berganda, diperoleh kesimpulan bahwa negara yang masyarakatnya memiliki budaya jarak kekuasaan tinggi dapat meningkatkan kecenderungan risiko *fraud*. Masyarakat yang memiliki individualisme yang rendah atau kolektivisme yang semakin tinggi dapat meningkatkan kecenderungan risiko *fraud*. Orientasi jangka panjang yang terbatas akan cenderung meningkatkan risiko *fraud* dan semakin tinggi budaya *indulgence* dalam suatu negara dapat menurunkan kecenderungan risiko *fraud*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya nasional yang dimiliki suatu negara dapat memberikan pengaruh terhadap risiko *fraud* yang dimiliki negara tersebut.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah durasi sampel penelitian yang digunakan hanya satu periode waktu sehingga tidak mampu menjelaskan risiko *fraud* secara luas. Pengaruh ekonomi makro juga berperan dalam penelitian ini. Pada saat penelitian ini di buat kondisi ekonomi makro menurut World Bank (2017-2019) dalam masa stabil setelah krisis ekonomi tapi ketidakpastiannya masih tinggi sehingga data penelitian ini menjadi tidak *predictable*. Serta, dalam penelitian ini risiko *fraud* diukur menggunakan *Corruption Perception Index* karena adanya keterbatasan data mengenai *fraud*.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penelitian selanjutnya adalah menambah durasi penelitian agar data penelitian lebih bervariasi. Serta, diharapkan menggunakan pengukuran data yang lebih tepat untuk mengukur proksi risiko *fraud* yang riil.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Indonesia Chapter. 2016. *Survei Fraud Indonesia*. Jakarta.
- Arturo, Angel, Pacheco Paredes, and Clark Wheatley. 2017. "The Influence of Culture on Real Earnings Management The Influence of Culture on Real Earnings Management." *International Journal of Emerging Markets* 12(1): 38–57.
- Association of Certified Fraud Examiners. 2014. *Report to The Nation - On Occupational Fraud and Abuse*.
- . 2016. *Report to The Nation - On Occupational Fraud and Abuse*.
- . 2018. *Report to The Nations - Global Study on Occupational Fraud and Abuse*.
- Burgess, Robert L, and Ronald L Akers. 2013. "A Differential Association-Reinforcement Theory of Criminal Behavior." *Social Problems* 14(2): 128–47.
- Cressey, Donald R. 1950. "The Criminal Violation of Financial Trust Author." *American Sociological Review* 15(6): 738–43.
- Desender, Kurt A., Christian E. Castro, and Sergio A. Leon. 2007. "Earnings Management and Cultural Values Kurt." *American Journal of Economics and Sociology* 70(3): 1–31.
- Fitria, Gustanty Dian, and Amilin. 2014. "Peran Integritas Personal Sebagai Pemediasi Pada Pengaruh Lingkungan Etika Organisasi , Kualitas Pengendalian Internal Dan Keadilan Organisasi Terhadap Terjadinya Fraud." *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* 1(1): 109–19.
- Hofstede. 2018. "The Values for the 6 Dimensions." *tersedia pada website <https://www.hofstede-insights.com/> (diakses pada 18 Desember 2018)*.

- Hofstede, Geert. 2011. "Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context." *International Association for Cross-Cultural Psychology*.
- Hofstede, Geert, Gert Jan Hofstede, and Michael Minkov. 2010. *Cultures and Organizations (Revised and Extended)*. The McGraw-Hill Companies.
- Kimbrow, Marinilka Barros. 2002. "A Cross-Country Empirical Investigation of Corruption and Its Relationship to Economic, Cultural, and Monitoring Institutions: An Examination of the Role of Accounting and Financial Statements Quality." *Journal of Accounting, Auditing & Finance* 17: 325.
- Mihret, Dessalegn Getie. 2014. "National Culture and Fraud Risk : Exploratory Evidence." *Journal of Financial Reporting and Accounting* 12(2): 161–76.
- the International Organization for Standardization. 2009. *Risk Management - Principles and Guidelines*.
- Transparency International. 2019. "Corruption Perception Index 2018." *tersedia pada website <http://cpi.transparency.org/> (diakses pada 31 Januari 2019)*.
- World Bank. 2017. *Global Economic Prospects A Fragile Recovery*.
- . 2018. *Global Economic Prospects The Turning of the Tide ?*
- . 2019. *Global Economic Prospects Darkening Skies*.
- Yamen, Ahmed, Anas Alqudah, Ahmed Badawi, and Ahmed. Bani-Mustafa. 2017. "The Impact of National Culture on Financial Crime: A Cross Country Analysis." In *The 40th Annual Congress of the European Accounting, Association University of Valencia* on May 10-12, 2017.
- Yeganeh, Hamid. 2014. "Culture and Corruption." *International Journal of Development Issues* 13(1): 2–24.
- Zhang, Xu, Xing Liang, and Hongyan Sun. 2013. "Individualism - Collectivism, Private Benefits of Control and Earnings Management : A Cross-Culture Comparison." *Journal of Business Ethics* 144(4): 655–64.